

**IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI BARANG
BUKTI HASIL TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PROGRAM
SUKSMA (SIAP UNTUK KIRIM SAMPAI ALAMAT) DI KEJAKSAAN
NEGERI GIANYAR**

Oleh:

Ni Putu Winda Astuti, NIM. 2214101031

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dan mengkaji implementasi peran kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui program “*Suksma*” (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat), serta (2) Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program “*Suksma*” (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Petugas Barang Bukti, dan Jaksa Eksekutor dengan teknik *purposive sampling*. Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dan dilakukan proses reduksi, yakni memeriksa data dengan kesesuaiannya dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bahwa implementasi program “*Suksma*” di Kejaksaan Negeri Gianyar selama tahun 2024 – 2025 belum efektif dalam hal mengurangi penumpukan barang bukti. Hal ini disebabkan karena dari Seksi PAPBB hanya mengantarkan barang bukti di wilayah Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk pengantaran ke luar wilayah kabupaten belum bisa dilakukan karena keterbatasan kendaraan operasional sehingga tidak semua barang bukti dapat diantarkan melalui layanan ini. (2) Dalam pelaksanaannya, program “*Suksma*” menghadapi sejumlah hambatan baik dari aspek teknis maupun administratif. Hambatan dari sisi teknis meliputi keterbatasan sarana dan prasana, kurangnya anggaran untuk melakukan pengantaran barang bukti ke luar wilayah Kabupaten Gianyar dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menerima informasi pengembalian barang bukti. Sedangkan hambatan dari aspek administratif yakni lambatnya penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) oleh jaksa eksekutor.

Kata Kunci: Kejaksaan, Eksekusi Barang Bukti, Program “*Suksma*”

**IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN
THE EXECUTION OF EVIDENCE FROM GENERAL CRIMES THROUGH
THE SUKSMA PROGRAM (READY TO SEND TO ADDRESS) AT THE
GIANYAR DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE**

By:

Ni Putu Winda Astuti, NIM. 2214101031

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims to (1) analyze and examine the implementation of the role of the prosecutor's office in the implementation of the execution of evidence resulting from general crimes through the "Suksma" (Ready to Send to Address) program, and (2) Identify and analyze the obstacles faced in the implementation of the "Suksma" program (Ready to ship to address). The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature. Data were collected through document studies, observations, and interviews with the Head of the Asset Recovery and Evidence Management Section, Evidence Officers, and Executing Prosecutors using purposive sampling techniques. The data that has been obtained will be collected and a reduction process will be carried out, namely checking the data for its suitability with the research topic.

The results of the study show that (1) that the implementation of the "Suksma" program at the Gianyar District Attorney's Office during 2024 – 2025 has not been effective in terms of reducing the accumulation of evidence. This is because the PAPBB Section only delivers evidence in the Gianyar Regency area, while delivery outside the district area cannot be done due to the limitations of operational vehicles so that not all evidence can be delivered through this service. (2) In its implementation, the "Suksma" program faces a number of obstacles both from technical and administrative aspects. Obstacles from the technical side include limited facilities and infrastructure, lack of budget to deliver evidence outside the Gianyar Regency area and lack of public participation in receiving information on the return of evidence. Meanwhile, the obstacle from the administrative aspect is the slow issuance of the Court Decision Implementation Order (P-48) by the executing prosecutor.

Keywords: *Prosecutor's Office, Execution of Evidence, "Suksma" Program*